

BAB V

Penutup

5.1. Kesimpulan

Kerjasama Diplomasi maritim yang terjalin antara Indonesia dan Filipina terbilang cukup efektif. Jika dilihat secara teoritis yang melatar belakangi adanya kerjasama yang efektif dari kedua negara tersebut ialah adanya keselarasan teori diplomasi pertahanan dengan skema kerjasama yang ada didalam kerjasama Indomalphi. Selain itu kepentingan Nasional tiap-tiap aktor dalam berbagai aspek politik. Pada pokok indikator ini juga yang mendorong beberapa negara untuk mengintervensi dalam upaya penyelesaian isu Kejahatan perompak di perairan Sulawesi-Filipina.

Dengan membentuk aliansi dengan negara anggota Asean lainnya yakni Malaysia dan Filipina ketiga negara tersebut berhasil menyepakati dan merumuskan kerjasama Trilateral Maritime Patrol. Model kerjasama tersebut berupa koordinate patrol yang disepakati pada tahun 2017, pada deklarasi ini Indonesia, Malaysi dan Filipina menyepakati 4 pokok kerjasama yang ada didalam Trilateral Maritime Patrol Indomalphi yakni:

1. Trilateral Maritime Patrol (TMP)
2. Maritime Command Center (MCC)
3. Transit Corridor
4. Port Visit

Selain itu konsep kerjasama diplomasi yang disepakati ini selaras dengan konsep diplomasi pertahanan maritim yang dikemukakan oleh Cottey & Forste. Kerjasama yang terjalin antara Indonesia dan Filipina merupakan aliansi dalam membangun kekuatan negara atas negara lain agar terciptanya balance of power dalam melindungi kepentingan nasionalnya dari segala macam bentuk ancaman, dengan instrumennya yang bersifat soft power namun dalam praktik kegiatannya tetap melibatkan militer. Adapun cakupan aktivitas yang ada dalam kerjasama

Coordinate Patrol ini ialah kegiatan patroli gabungan baik dari jalur udara maupun laut, pertukaran perwira militer dan kelompok kerja, latihan militer gabungan, pengadaaan seminar dan diskusi publik bersama, barter informasi secara intens. Yang juga merupakan serangkaian konsep diplomasi pertahanan yang sesuai dikemukakan oleh Cottey&Forste.

Kerjasama yang dibangun ini merupakan respon serta komitmen kedua negara dalam menanggapi berbagai macam isu kejahatan maritim di wilayah perairan Sulawesi-Sulu yang dapat mengancam stabilitas keamanan internasional, juga dapat menghambat keberlangsungan alur perdagangan serta berbagai macam aktivitas ekonomi lainnya. Komitmen kerjasama antara Indonesia-Filipina mampu membuahkan hasil yang signifikan dalam menekan angka kejahatan perompak di perairan Sulawesi-Sulu. Hal tersebut dibuktikan dengan hasil laporan ReCAP terhitung sejak tahun 2018-2022 mengalami peningkatan dalam menekan angka kejahatan perompak di perairan Sulawesi-Sulu.

Dibalik kesuksesan kerjasama sama Koordinat Patrol, terdapat beberapa hambatan yang menjadi tantangan besar dalam menyongsong keberhasilan kerjasama ini untuk dalam jangka waktu yang panjang. Yakni rancangan kerjasama Hot Pursuit yang sebenarnya menjadi titik utama dalam mendorong efektivitas kerjasama ini. Hot Pursuit telah digagas sejak awal berdirinya kerjasama Koordinat Patrol Indonesia-Filipina, namun realisasi dari kerjasama ini masih menjadi perselisihan antar negara karena baik Indonesia, Filipina dan Malaysia masih enggan untuk merelakan kawasan yuridiksinya dijelajahi oleh negara lain.

Hal tersebut didasari karena masih adanya sensitivitas dari masing-masing negara terkait sengketa kawasan yang juga menjadi faktor utama timbulnya ketegangan hubungan diplomatik antara Indonesia, Malaysia dan Filipina. Meskipun demikian, hal tersebut tidak berarti memberikan hambatan yang sangat krusial bagi keberlangsungan efektivitas kerjasama Coordinate Patrol. Hal tersebut didorong karena adanya fokus kepentingan tiap-tiap negara dalam mewujudkan kawasan maritim Sulawesi Sulu menjadi kawasan maritim yang aman sebagai pusaran alur lalu lintas perdagangan Dunia, serta dapat mendorong perekonomian global.

5.2. Saran

Pada penelitian ini penulis akan memberikan sedikit saran praktis terkait kerjasama Internasional, kepada pemerintah selaku aktor utama dalam merumuskan dan memutuskan suatu kebijakan Internasional kawasannya perlu adanya keterlibatan kerjasama multilateral dalam menangani isu keamanan maritim. Khususnya keterlibatan kerjasama dengan negara-negara anggota Asean lainnya, karna laut merupakan rumah serta kunci bagi keberlangsungan roda perekonomian masyarakat Asean, dengan mayoritas latar belakang negara sebagai kawasan bahari.

Mengingat bahwasannya Indonesia dan Filipina merupakan Negara middle power baik dari segi ekonomi serta politiknya. Sehingga dalam kerjasama maritim kedua negara ini masih ditemukan banyak keterbatasan serta hambatan yang dialami oleh keduanya yakni berupa kapabilitas militer khususnya dalam penggunaan alutsista, ketersediaan kapal perang guna menjalankan misi patroli gabungan, ketersediaan pesawat tempur, ketersediaan teknologi canggih guna menghalau adanya bentuk kejahatan cyber. Maka dari itu perlu adanya keterlibatan negara Super Power dalam membangun kekuatan negara atas negara lain guna melindungi kedaulatan serta kepentingan nasional kawasannya.

Selain itu, adanya keterlibatan dari negara lain juga bisa dijadikan penengah jika ditemukan adanya ketegangan hubungan diplomatik yang disebabkan beberapa faktor sentimen lainnya, sehingga kerjasama maritim yang terjalin dapat berjalan secara harmonis serta dapat memperoleh pencapaian yang efektif sesuai dengan Visi dan Misi kerjasama Trilateral Maritime Patrol Indomalphi.